

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Secara deskriptif dari hasil model pengukuran (*measurement model*) semua variabel menunjukkan bahwa indeks persentase variabel (kelembagaan masyarakat, dukungan *stakeholders*, pemberdayaan masyarakat, dinamika kelompok, partisipasi petani, dan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan) memiliki kategori sangat tinggi dengan interval (81,05% - 83,86%). Hasil pengukuran adalah: 1) Nilai *outer model/ weights of loading* menunjukkan bahwa semua indikator dapat menjelaskan masing-masing variabel laten dengan baik atau konstruk memiliki reliabilitas tinggi (nilainya $\geq 0,7$), 2) Korelasi variabel laten dengan variabel laten lainnya dalam suatu model memenuhi syarat valid (nilai lebih besar 0,50), dan 3) Nilai reliabilitas variabel laten memenuhi kriteria sehingga instrumen penelitian memenuhi persyaratan konsistensi sebagai alat ukur.
2. Secara analitik dapat disimpulkan bahwa hubungan faktor pemberdayaan masyarakat, kelembagaan masyarakat, dukungan *stakeholders*, dinamika kelompok tani, dan partisipasi petani terhadap pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan sebagai berikut: 1) Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat, partisipasi petani, sedangkan dukungan *stakeholders* tidak berpengaruh dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 68,7%, 2) Partisipasi petani dipengaruhi dinamika kelompok, dan dukungan *stakeholders*, sedangkan kelembagaan masyarakat tidak berpengaruh dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 56,9%, 3) Dinamika kelompok dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, sedangkan dukungan *stakeholders* tidak berpengaruh dengan koefisien determinasi (R^2)

sebesar 50,4%, dan 4) Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kelembagaan masyarakat dan dukungan *stakeholders* dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 49,4%.

3. Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan SEM PLS ditemukan model pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan yang menunjukkan adanya hubungan langsung dan tidak langsung yang signifikan. Hubungan langsung, yaitu: kelembagaan masyarakat dan partisipasi petani, sedangkan hubungan tidak langsung, yaitu: 1) dinamika kelompok, 2) dukungan *stakeholders*, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian model struktural dengan 10 indikator, yaitu: 1) *Average path coefficient* (APC), 2) *Average R-squared* (ARS), 3) *Average block VIF* (AVIF), 4) *Average adjusted R-squared* (AARS), 5) *Average full collinearity VIF* (AFVIF), 6) *Tenenhaus GoF* (GoF), 7) *Sympson's paradox ratio* (SPR), 8) *R-squared contribution ratio* (RSCR), 9) *Statistical suppression ratio* (SSR), dan 10) *Nonlinear bivariate causality direction ratio* (NLBCDR) menunjukkan bahwa semua sehingga memenuhi kriteria model fit, sehingga model dapat berlaku secara umum.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Peran penting kelembagaan masyarakat ditunjukkan oleh adanya komitmen masyarakat yang tinggi dari pandangan masyarakat bahwa: a) hutan rakyat adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga kelestariannya, b) hutan rakyat bukan sekedar kebun kayu yang bernilai ekonomi, tetapi keberadaan hutan rakyat adalah dapat menunjukkan jati diri masyarakat. Menurut Armitage dan Plummer (2010) strategi adaptasi merupakan mekanisme penyesuaian diri di mana masyarakat mempunyai kemampuan sistem sosial secara sosial-ekologi dalam menghadapi dan merespon perubahan dari faktor internal dan eksternal.

Adaptasi dilakukan sebagai sebuah strategi untuk menanamkan kesadaran bahwa hutan rakyat harus dilakukan pengelolaan dengan memasukkan aspek lingkungan. Peran hutan rakyat pada lingkungan sangat dibutuhkan sebagai katup penyelamat ekologi sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan. Strategi tersebut dilakukan untuk mengatasi adanya kelangkaan hukum/ aturan dan teori perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) yang mengarah pada perubahan hak kepemilikannya (alih fungsi lahan).

Dukungan *stakeholders* sangat diperlukan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan melalui pengembangan peran *stakeholders* berbasis kebutuhan. Dukungan *stakeholders* pada sektor hilir belum berperan secara optimal karena bekerja secara parsial dan tidak terintegrasi, sehingga manfaat dari dukungan *stakeholders* belum dirasakan secara berkesinambungan. Pemahaman persepsi dan motivasi *stakeholders* sangat penting dalam kaitannya dengan proyek konservasi dan kawasan lindung. Pentingnya analisis *stakeholders* secara luas diakui sebagai suatu keharusan untuk mendapatkan wawasan tentang interaksi sistemik yang kompleks antara proses alami, kebijakan manajemen, dan masyarakat setempat tergantung pada sumber daya, serta peningkatan partisipasi publik, peningkatan identifikasi, komunikasi, dan kerjasama antara berbagai aktor utama dalam sistem, dan menilai kepentingan ekonomi masing-masing dalam sistem sehingga didapatkan fondasi untuk tata kelola hutan yang baik (Grimble and Chan, 1995; Hjortso *et al*, 2005; Nichiforel, 2011).

2. Implikasi Metodologis

Dalam pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan perlu dilakukan pendekatan dengan disiplin ilmu yang lainnya karena sejarah dan luasnya permasalahan dalam pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Keberlangsungan pengelolaan hutan

rakyat perlu dipertahankan karena hutan memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

3. Implikasi Praktis

- a. Prilaku petani dalam pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan merupakan bentuk komitmen (kepatuhan) petani dan masyarakat terhadap lingkungan alam kehidupannya dan keadaan kelembagaan masyarakat yang sangat mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam praktik pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Berdasarkan pada sikap petani terhadap persoalan keberlanjutan, masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat sudah mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan komitmen hidup bahwa sebagian petani menanam pohon merupakan bentuk investasi untuk kebutuhan anak dan bahkan untuk cucunya, sehingga pola seperti ini perlu diapresiasi oleh masyarakat lain yang memiliki komitmen menjaga kelestarian hutan rakyat untuk kehidupan yang mempertimbangkan kebutuhan antargenerasi.
- b. Komitmen secara personal di atas perlu dikembangkan dalam lingkungan sosial yang lebih luas bahkan dilembagakan. Kelembagaan yang berwatak sosial dan ekonomi dapat dikembangkan dengan memperluas konsep kelembagaan koperasi tunda tebang sebagai bentuk akomodasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan untuk kebutuhan hidup yang mendesak.
- c. Alternatif lainnya adalah diperlukan pengembangan ekosistem usaha yang dapat memberikan kepastian dalam inovasi usaha diversifikasi di lahan hutannya dan penciptaan lapangan kerja diluar hutan rakyatnya untuk mengurangi tekanan terhadap lahan hutan rakyatnya. Pengembangan usaha yang dilakukan tidak dapat bertahan lama dikarenakan hanya bersifat insidensial dan tidak menyeluruh memperlakuan diversifikasi inovasi usaha sebagai suatu sistem yang utuh.

- d. Hutan rakyat, masyarakat, dan lingkungannya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata berbasis lingkungan alam dan berbasis budaya terutama keramahan masyarakat (budaya masyarakat) di kawasan hutan. Masyarakat perlu dilakukan edukasi untuk mempertahankan nilai-nilai keunggulan budaya lokal (penghargaan kepada alam, tata-krama/ unggah-ungguh, sopan-santun, dan potensi lokal lainnya) yang dapat mempertahankan masyarakat dan hutan tanpa menolak perubahan yang dapat meningkatkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan hutannya. Kombinasi antara hutan, budaya masyarakat, dan lingkungan fisik yang ada dapat diupayakan untuk ditingkatkan nilai keberlanjutannya melalui usaha menjadikan wilayah ini menjadi cagar budaya.
- e. Model pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan membutuhkan dukungan banyak pihak. Penelitian Nichiforel (2011) menunjukkan bahwa keterlibatan *stakeholders* dari tingkat lokal, regional, nasional, dan global atau internasional dibutuhkan untuk memutuskan kepentingan siapa yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan atau menerapkan kebijakan. Pemerintah desa, kecamatan, provinsi dan lembaga pemerintah terkait perlu secara intensif untuk mempertahankan hutan rakyat dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga akan memberikan insentif bagi masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan manajemen pengelolaan hutan rakyat, mengingat selama ini terjadi perubahan-perubahan pengelolaan hutan rakyat dan permasalahan hubungan administrasi dan hubungan fungsional dari keberadaan hutan sering terabaikan.

C. Saran

1. Bagi Masyarakat, kelembagaan masyarakat dan dukungan *stakeholders* merupakan dua variabel eksogen (bebas) yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan partisipasi petani. Kedua variabel perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk keberhasilan pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Peningkatan dan pengembangan ide dan inovasi dapat dipergunakan sebagai strategi sehingga dapat menampung perubahan karena kebutuhan perkembangan zaman (ilmu pengetahuan dan teknologi) untuk kehidupannya (khususnya pengelolaan hutan rakyat) tanpa kehilangan jati dirinya sebagai modal dasar dalam perkembangan masyarakat menuju masyarakat yang adaptif.
2. Bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerhati Hutan Rakyat lainnya diperlukan peningkatan peran lebih intensif sehingga dapat mengembangkan wilayah ekosistem hutan rakyat yang bertumpu pada potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya.
3. Bagi Pemerintah/ Pengambil Kebijakan
 - a. Berdasarkan pada hak kepemilikan hutan rakyat dan kesediaan masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan, perlu meningkatkan peran dukungan *stakeholders* dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan hutan. Berdasarkan pada keterbatasan tenaga pendamping (penyuluh kehutanan, penyuluh kehutanan swadaya, dan tenaga pendamping dari lembaga swadaya masyarakat) dan semakin banyaknya permasalahan dalam pembangunan hutan rakyat maka perlu melakukan pengkaderan dari masyarakat untuk ikut serta aktif serta memperbaiki teknis pengelolaan hutan rakyat. Pengelolaan tersebut melibatkan secara teknis dari aparat Desa sampai Propinsi serta instansi yaitu Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten/ Propinsi dan Dinas yang terkait.

- b. Mengingat pentingnya keberadaan hutan rakyat bagi masyarakat di kawasan hutan serta lingkungan yang lebih luas, perlu dilakukan pemantapan kawasan hutan untuk menghindari alih fungsi hutan melalui Peraturan Daerah dan Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Di samping itu diperlukan adanya kebijakan untuk pengembangan kawasan hutan rakyat sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada (industri kerajinan, kuliner, wisata alam dan budaya, dan sebagainya).

